

BAB V

KESIMPULAN

Media massa di Indonesia berkembang seiring dengan bergantinya pemerintahan. Kebijakan pemerintah turut mempengaruhi kinerja para penggiat media massa (jurnalis) dalam menjalankan tugas dan perannya sebagai sebuah lembaga yang mengusung netralitas. Seperti yang terjadi di masa pemerintahan Orde Baru, ketika pers terjebak dalam kebijakan pemerintah melalui Undang-Undang Pokok Pers tahun 1982, pada saat itu kebanyakan media massa tidak dapat memuat kritikan-kritikan terhadap kinerja pemerintah karena kritikan tersebut akan dianggap sebagai penghambat jalannya pembangunan nasional. Hingga akhirnya pemerintahan Orde Baru tumbang dan Indonesia memasuki masa transisi menuju era Reformasi, akhirnya dunia pers dapat bernafas lega dengan ditetapkannya Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers yang didalamnya menghapus peraturan mengenai berlakunya Surat Izin Untuk Penerbitan (SIUP) bagi setiap penerbitan di Indonesia. Era reformasi mengubah wajah dunia pers yang suram kini menjadi lebih cerah, munculnya media massa cetak baru dalam jumlah yang cukup banyak mencerminkan sisi positif dari era pemerintahan yang baru.

Di Era Reformasi, peran media massa pun semakin terasa di masyarakat, terlebih dalam masa pemilihan umum. Media massa menjadi alat komunikasi bagi si pemilih dan yang dipilih. Selain itu juga media massa menjadi pengawas pemilihan umum dimulai dari tahap awal pemilihan umum hingga berakhirnya pemilihan umum. Pemilihan umum di Indonesia pun mengalami perubahan ketika memasuki era reformasi. Pemilihan umum 1999, merupakan pemilihan umum yang pertama kali dilakukan setelah jatuhnya pemerintahan Orde baru. Pemilihan umum 1999 tersebut disambut dengan antusias oleh masyarakat, khususnya masyarakat yang tidak menyukai pemerintahan orde baru. Membludaknya keikutsertaan partai peserta pemilihan umum 1999 adalah bukti dari rasa antusias masyarakat untuk mewujudkan demokrasi di Indonesia ini. Pelaksanaan pemilihan

umum 1999 dilaksanakan pada tanggal 7 Juni 1999 dan partai yang berhasil meraih suara rakyat terbanyak adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang dipimpin oleh Megawati Soekarnoputri. Kemenangan Megawati bersama partainya yaitu PDI Perjuangan bukanlah sebuah kemenangan yang mutlak untuk mendapatkan kursi jabatan presiden RI, karena pemilihan presiden dilakukan didalam Sidang Umum MPR 1999. Hasil Sidang Umum MPR 1999 pun menyatakan bahwa yang menjadi presiden Indonesia keempat adalah Abdurrahman Wahid sedangkan Megawati harus puas dengan jabatan sebagai wakil presiden. Namun Megawati tidak perlu menunggu 5 tahun lamanya untuk bisa merasakan kursi presiden, karena pada tahun 2001, Presiden Abdurrahman Wahid dicabut jabatannya sebagai presiden oleh MPR dalam Sidang Istimewa yang berlangsung pada tanggal 23 Juli 2001. Dan secara otomatis Megawati menggantikan posisi Abdurrahman Wahid sebagai presiden Republik Indonesia. Masa jabatan Megawati sebagai presiden berlangsung dari tahun 2001 hingga 2004. Pada tahun 2004 itu pun, Megawati kembali mencalonkan diri sebagai presiden dalam Pemilihan umum presiden 2004.

Pelaksanaan Pemilihan umum 2004 terbagi menjadi kedalam dua bagian, yaitu pemilihan umum legislatif dan pemilihan umum presiden. Pada pemilihan umum 2004 ini untuk pertama kalinya rakyat Indonesia diikutsertakan dalam pemilihan presiden. Partai yang berhasil lolos sebagai peserta Pemilu 2004 hanya ada 24 partai. Sedikitnya jumlah partai peserta pemilihan umum tidak mempengaruhi antusias masyarakat untuk ikut serta dalam pemilihan umum 2004. Partai yang masuk peringkat tujuh besar pilihan rakyat adalah Partai Golkar, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Kebangsaan Bangsa, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Amanat Nasional. Ketujuh partai tersebut berhak untuk ikut dalam pemilihan umum presiden 2004 karena ketujuh partai tersebut telah berhasil meraih suara lebih dari 3 %. Pemilu Presiden 2004 pun diikuti oleh 5 pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, yaitu Megawati Soekarnoputri-Hasyim Muzadi, Susilo

Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla, Wiranto-Salahudin, Amien Rais - Siswono Yudhohusodo, dan Hamzah Haz-Agum Gumelar.

Hasil dari Pemilihan umum Presiden 2004 yang dilaksanakan pada tanggal 5 Juli 2004 adalah keluarnya pasangan Susilo Bambang yudhoyono-Jusuf Kalla sebagai pemenang dengan persentase perolehan suara sebanyak 33,57% disusul oleh pasangan Megawati Soekarnoputri-Hasyim muzadi dengan 26,61% perolehan suara. Diurutan ketiga ada pasangan Wiranto-Salahuddin Wahid dengan 22,15% perolehan suara dan diurutan keempat ada pasangan Amin Rais-Siswono Yudhohusodo dengan perolehan suara 14,66%, dan pasangan diurutan terkahir adalah Hamzah Haz-Agum Gumelar dengan peroleh suara sebanyak 3,01%. Dari hasil persentase perolehan suara kelima pasangan capres dan cawapres diatas, maka diadakan kembali pemilu presiden putaran kedua karena dari kelima pasangan capres dan cawapres tersebut tidak ada yang berhasil meraih suara sebanyak lebih dari 50%. Pasangan capres dan cawapres yang berhak ikut dalam pemilu presiden putaran kedua adalah pasangan Susilo Bambang Yudhoyono – Jusuf kalla dan pasangan Megawati - Hasyim Muzadi. Kedua pasangan tersebut bertarung kembali dalam pemilu presiden putaran kedua yang diadakan pada tanggal 20 September 2004. Hasil pemilu presiden putaran kedua tahun 2004 pun menyatakan bahwa pasangan Susilo Bambang Yudhoyono – Jusuf kalla keluar sebagai peraih suara rakyat terbanyak dengan persentase 60,62% dan berhak menjabat sebagai Presiden dan wakil presiden masa jabatan 2004-2009.

Keberhasilan dari kedua pemilihan umum dimasa awal reformasi yaitu pemilu 1999 dan 2004 tidak lepas dari peran media massa. Informasi-informasi yang disajikan oleh media massa mengenai visi misi peserta pemilu, opini dan kritik dari masyarakat pemilih yang aktif dan paham terhadap pemilihan umum diharapkan bisa menjadi media pendidik bagi masyarakat pemilih yang pasif dan tidak paham mengenai pemilihan umum. informasi-informasi mengenai pemilihan umum dalam media massa disajikan dalam bentuk *news* dan *views*

News dan *views* yang merupakan produk dari media massa memberikan pengaruh yang cukup besar bagi pemilih untuk menentukan pilihannya disaat

pelaksanaan pemilihan umum. Salah satu contohnya kemenangan Megawati bersama partainya PDI Perjuangan dalam Pemilihan Umum 1999. Sosok Megawati Soekarnoputri pada saat pemilu 1999, bisa jadi merupakan sosok yang dielu-elukan oleh masyarakat dan menjadi topik pemberitaan di media massa karena diyakini memiliki jiwa kepemimpinan seperti ayahnya yaitu Presiden pertama RI Soekarno dan juga diyakini sebagai simbol dari perlawanan terhadap pemerintahan Orde Baru. Namun bagaimanapun juga, media massa harus tetap mengusung netralitas, sehingga tidak hanya memberitakan hal-hal yang positif saja mengenai Megawati namun sisi negatifnya juga ditampilkan. Seperti yang dilakukan oleh Majalah *Tempo* dan *Gatra*. Kedua majalah tersebut dikenal dengan majalah yang fokus terhadap pemberitaan politik. Pada pemilu 1999 dan pemilu 2004, kedua majalah tersebut menampilkan baik itu sisi positif dan sisi negatif dari sosok Megawati. Sisi positif Megawati dimuat dalam majalah *Tempo* dan *Gatra* dalam bentuk profil atau riwayat hidup contohnya artikel berjudul “Beban Berat Seorang Putri” yang dimuat dalam majalah *Tempo*. Sedangkan sisi negatif Megawati dimuat dalam bentuk kritikan atas sikap dan kinerja dari Megawati itu sendiri yang ditampilkan pada rubrik opini atau kolom pada kedua majalah tersebut, contohnya laporan utama pada majalah *Tempo* yang berjudul “Gunting Pita Dongkrak Citra” dan laporan utama pada *Gatra* yang berjudul “Putar Otak Meramu Janji”.

Kemenangan dan kekalahan suatu partai atau tokoh dalam pemilu tidak lepas dari peran media massa yang memuat informasi tentang peserta pemilu, namun salah satu yang menjadi faktor penentu kemenangan dan kekalahan suatu partai atau perorangan dalam pemilu adalah penilaian masyarakat atas sikap dan kinerja dari para peserta pemilu itu sendiri yang ditampilkan oleh media massa. Seperti yang terjadi kepada Megawati Soekarnoputri ketika melakukan aksi diam pada pemilihan umum 1999. Sikap diam Megawati pada pemilu 1999 ditanggapi oleh media massa dengan menampilkan tanggapan dari tokoh ataupun masyarakat yang pro dan kontra terhadap aksi diam Megawati tersebut. Ada yang menyebut aksi diam itu adalah sebuah cerminan dari sikap bijaksana seorang

Megawati dan dari kalangan yang kontra terhadap aksi diam Megawati tersebut selalu menghubungkan dengan sifatnya yang pendiam dan tidak ingin terbuka kepada masyarakat luas mengenai ide atau gagasan-gagasannya. Bahkan terkadang disangkutkan dengan tingkat intelektualitas Megawati yang kurang dibandingkan dengan saingan-saingannya di bursa pencalonan presiden. Tanggapan dari kalangan yang kontra terhadap aksi diam Megawati tersebut bisa saja mempengaruhi masyarakat menjadi meragukan kemampuan Megawati bila nanti terpilih menjadi presiden.

Sama halnya ketika Megawati berlaga di bursa pencalonan presiden pada pemilihan umum 2004. Megawati yang pada waktu berlangsungnya pemilihan umum 2004 masih menjabat sebagai presiden (presiden *incumbent*) mendapatkan perhatian lebih dari media massa mengenai kinerjanya sebagai presiden. contohnya pada beberapa artikel di *Tempo* dan *Gatra* yang menyinggung soal kegagalan pemerintahan Megawati dalam hal penyelesaian masalah pengangguran yang mungkin akan jadi penghambat bagi pasangan Megawati-Hasyim untuk menang dalam pemilu presiden 2004. Tidak tanggung-tanggung, *Tempo* dan *Gatra* menampilkan kritikan-kritikan terhadap kinerja pemerintahan Megawati tersebut dengan menggunakan narasumber dari para pakar tertentu hingga masyarakat biasa. Pemberitaan-pemberitaan negatif mengenai kinerja Megawati sebagai presiden tersebut bisa jadi mempengaruhi para pemilih untuk memutuskan tidak mendukung atau mempercayai Megawati kembali menjadi Presiden RI. Dan kenyataannya pun pada pemilu presiden 2004, Megawati kalah bersaing dengan mantan mentrinya Susilo Bambang Yudhoyono baik itu pada pemilu presiden putaran pertama dan kedua.

Keberpihakan media terhadap salah satu calon presiden pada pemilu 1999 dan 2004 tidak terlihat pada majalah *Tempo* dan Majalah *Gatra* hal tersebut disebabkan karena kedua majalah tersebut memiliki visi dan misi yang hampir sama yaitu menjadi media yang bertanggungjawab, jujur dan menghargai perbedaan pendapat (terbuka) selain itu juga mungkin dikarenakan pada tahun 1999-2004 belum adanya media massa cetak ataupun elektronik yang dikuasai

atau dimiliki oleh salah satu elit politik. Lain halnya dengan masa kini, banyak media yang memang dimiliki oleh tokoh elit politik contohnya seperti Metro TV dimiliki oleh Surya Paloh pimpinan partai Nasional Demokrat, dan TV One dimiliki oleh Aburizal Bakrie pimpinan partai Golkar. Dikarenakan adanya kepemilikan media oleh beberapa elit politik tersebut maka yang terjadi adalah pemberitaan yang tidak seimbang dan pemberitaan yang saling menjatuhkan seperti yang terjadi pada pilpres 2014 kemarin antara kubu capres Jokowi dan kubu capres Prabowo. MNC Group(MNC TV, RCTI, Global TV) sebagai pendukung capres Prabowo-Hatta media tersebut dalam penayangan iklan maupun berita mengenai Prabowo terhitung sangat sering, lain halnya dengan pemberitaan lawannya, capres Jokowi, jumlah penayangan iklan maupun berita sangatlah sedikit. Sebaliknya, Metro TV yang mendukung kubu capres Jokowi bertindak hal yang sama dengan MNC Group. Metro TV lebih sering menayangkan iklan dan berita sosok Jokowi dibandingkan lawannya yaitu Prabowo.

Keberpihakan media terkait dalam pemberitaan pemilu presiden menurut Masduki bahwa pelaksanaan pemilihan umum yang bertepatan dengan era komersialisasi media memperlihatkan berlakunya teori ekonomi pasar dalam jurnalistik (Masduki dalam Handrini, 2014. Hlm. 17). Penulis mengartikan hal tersebut bahwa adanya kekuatan investor dibalik proses produksi berita-berita yang akan disajikan oleh media-media yang dimiliki oleh kalangan elit tertentu.